

Ikhtisar Webinar

Mengkaji Strategi Pertahanan Ibu Kota Nusantara



Mengkaji Strategi Pertahanan Ibu Kota Nusantara

21 Juni 2022 | 14:00–16:00 WIB

Webinar Mengkaji Strategi Pertahanan Ibu Kota Nusantara dimoderatori oleh Iis Gindarsah, Koordinator Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), serta dibuka oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputy V Kantor Staf Presiden sekaligus Penasihat Senior LAB 45, dan Rangga Aditya, Ketua Departemen Hubungan Internasional (HI) Universitas Bina Nusantara (Binus). *Webinar* ini menghadirkan tiga pakar yakni: (1) Curie Maharani Savitri, dosen HI Universitas Binus; (2) Laksma TNI Didong Rio D.P.K., Kepala Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Kapusjianmar Seskoal); dan (3) Jupriyanto yang merupakan dosen Universitas Pertahanan RI.

Jaleswari Pramodhawardani memberikan sambutan dengan menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana utama pertahanan dan keamanan dalam rangka kelancaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Nusantara sebagai IKN baru memiliki ancaman yang cukup genting karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada dalam jangkauan rudal hipersonik. Komponen intelijen, pertahanan, keamanan, dan siber digunakan untuk mengamankan Nusantara yang akan menjadi *Center of Gravity* (CoG) baru di bidang pertahanan. Sementara itu, Rangga Aditya menyampaikan bahwa kajian kolaborasi LAB 45 dengan Centre for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Departemen HI Universitas Binus hadir untuk menganalisis ancaman-ancaman terhadap IKN tersebut menggunakan maha data, sehingga menghasilkan rekomendasi atas penyelenggaraan pertahanan IKN.

Curie Maharani Savitri memaparkan bagaimana IKN kurang mendapat perhatian dalam kajian perang. Padahal, mengkaji CoG dari sebuah IKN penting karena mempengaruhi pengaturan postur keamanannya. Oleh karena itu, kajian kolaborasi ini menganalisis pola pertempuran IKN, pertimbangan IKN darurat, skenario pergeseran kerawanan IKN, serta rekomendasi strategi pertahanan IKN. Pertama, pola pertempuran IKN secara historis dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek seperti karakter geografi dan bentuk serangan. Kedua, karakter IKN darurat didominasi oleh kota yang memegang peran penting dalam ekonomi, medan geografi kompleks, dan bernilai strategis. Ketiga, perbedaan ancaman antara Jakarta dan

Nusantara sebagai IKN dikaji berdasarkan dimensi demografi dan geografi perbatasan. Jakarta lebih didominasi oleh ancaman dari dalam negeri karena memiliki potensi konflik akibat populasinya yang besar dan dengan demografi yang beragam. Bagi Nusantara, aspek geostrategis yang kompleks memunculkan potensi ancaman antarnegara, seperti pelanggaran wilayah perbatasan yang bisa menjadi serangan terhadap IKN dan ancaman dari jangkauan gelar kekuatan militer negara-negara adidaya Indo-Pasifik. Keempat, perubahan geografi militer tersebut pada akhirnya menggeser strategi pertahanan baru menjadi strategi antiakses/penangkalan (*anti-access/area denial, AA/AD*) dengan pertahanan berlapis.

Diskusi dilanjutkan oleh Laksma TNI Didong Rio yang mengangkat aspek pertahanan IKN dari perspektif matra laut. Postur strategi pertahanan IKN didasari oleh ancaman terkait kondisi geografis dan lingkungan strategis. Karakter lokasi IKN Nusantara mendukung pertahanan karena secara geomorfologi terlindungi dari serangan udara, cukup berjarak dari tepi pantai yang bisa menjadi tumpuan kekuatan laut musuh, memiliki kota-kota satelit sebagai benteng pertama perlawanan jika ada agresor, serta dikelilingi oleh instansi dan satuan militer. Konsep strategi pertahanan IKN pada matra laut melibatkan semua komponen melalui prinsip pertahanan semesta, termasuk penangkalan dengan diplomasi dan intelijen, program pembangunan kekuatan dengan *layer defense* dan AA/AD, pelibatan komponen cadangan dan induk, validasi organisasi, penyusunan kontingensi, serta penggunaan dan koordinasi sumber daya yang ada.

Jupriyanto sebagai narasumber terakhir memaparkan bahwa pembangunan sistem pertahanan dan keamanan IKN mempertimbangkan perubahan aspek evolusi perang, tipologi perang, serta teknologi pertahanan. Sistem pertahanan IKN harus dirancang berdasarkan *smart defense* dan *dual strategy* yang difokuskan pada *hard defense* berdasarkan teknologi mutakhir pada wahana udara dengan optimalisasi Zona Identifikasi Pertahanan Negara, wahana darat dengan pembangunan postur pertahanan defensif aktif dan berlapis, wahana laut dengan pembangunan deteksi dini dari *Virtual Maritime Gate* di Selat Makassar, serta wahana siber dengan pembangunan infrastruktur pendukung *smart cyber* dan *smart security*.

Terdapat sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh peserta pada sesi tanya-jawab. Beberapa di antaranya adalah pertama, apakah jenis pertempuran yang akan

dihadapi oleh pihak bertahan adalah *jungle* dan *urban warfare*, serta bagaimana potensi penggunaan *drone*. Curie menjawab bahwa berdasarkan data yang dihimpun, medan geografi tidak selalu berperan besar dalam pertempuran IKN yang pernah terjadi. Untuk IKN Nusantara, perbatasan darat yang berupa hutan bisa menjadi titik masuk lawan maupun tempat pertempuran. Curie menyampaikan bahwa dalam kajian sudah turut memperhitungkan *drone* dan bahkan potensi serangan siber. Laksma TNI Didong turut menjawab bahwa dalam kalkulasi tempur sudah memasukkan model heterogen dan dilakukan uji coba penggunaannya. Kedua, bagaimana alternatif strategi pertahanan laut selain penangkalan atau bahkan *retaliation* (pembalasan). Laksma TNI Didong menjawab bahwa strategi akan terus berkembang, namun fokusnya pada pelatihan dan penangkalan dengan harapan tidak perlu strategi pembalasan karena berarti kondisi pertahanan sudah diserang. Ketiga, apakah pengamanan dengan *smart defense* mampu tercapai sesuai rencana dan bagaimana caranya untuk mengoptimalkan industri pertahanan yang masih bergantung pada luar negeri. Jupri mengingatkan bahwa geoteknologi serta variasi dan penerimaan produk menjadi penting. Kemampuan deteksi, pemindaian, dan evakuasi perlu dimiliki dalam *smart defense*. Keempat, apakah perubahan CoG dengan adanya Nusantara nantinya akan sama atau berbeda dengan saat ini. Jupri mengatakan berkaca pada negara-negara besar, segregasi pusat kekuasaan dan ekonomi perlu didukung meskipun secara kultural susah diterapkan di Indonesia. Curie menambahkan bahwa pemindahan pusat kekuasaan membutuhkan penyeimbangan gelar kekuatan dengan menambah pangkalan aju di Kalimantan atau menggeser yang semula terkonsentrasi di Indonesia bagian bawah. Namun, hal ini kemudian membawa risiko *overstretch* dan terhadap kemampuan fiskal negara. CoG yang tidak terkonsentrasi juga cukup menguntungkan dalam hal menentukan opsi-opsi IKN darurat agar memiliki daya tahan yang lebih besar.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Selasa, 21 Juni
2022

➔ +62811452045

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id